

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank adalah lembaga keuangan yang keberadaannya sangat penting bagi orang banyak yang awalnya dulu dimasyarakat hanya sebagai alat penukaran uang namun semakin berkembangnya zaman bank semakin populer dikalangan masyarakat bukan sebagai alat penukaran saja tetapi sebagai alat penitipan uang (simpanan) dan munculah jasa-jasa lainnya yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana atau yang membutuhkan dana yang mendominasi kemajuan perekonomian suatu negara (Kasmir, 2004). Bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga perantara keuangan dalam perekonomian sebagai jasa keuangan dan sebagai lembaga intermediasi yang berperan aktif sebagai penggerak langsung dalam sektor riil (Maryandi, 2014).

Dalam perekonomian, bank dapat dikatakan sebagai darah dan nyawa perekonomian suatu negara karena semakin majunya suatu negara maka semakin besar peranan bank dalam mengendalikan negara tersebut karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat vital misalnya dalam masalah mengatur keuangan (Kasmir, 2004).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu dijelaskan bahwa selain Bank Umum ada jenis bank lain yang juga memiliki landasan hukum yang jelas yaitu Bank Perkreditan

Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang tidak memberikan lalu lintas pembayaran serta jasa-jasa yang diberikannya lebih sempit daripada jasa-jasa yang diberikan oleh Bank Umum dan hanya menerima simpanan berbentuk deposito berjangka dan tabungan bentuk lainnya yang tugasnya dalam memberikan jasa-jasa perbankan tidak seluas yang diberikan oleh Bank Umum serta dikalangan masyarakat BPR kalah populer dibandingkan bank umum namun sebenarnya keberadaan BPR ditengah-tengah Bank Umum sangat berguna karena BPR memiliki *market standing* yang sangat kuat di pasar terutama bagi usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Bank Perkreditan Rakyat pelaksanaan usahanya bisa secara konvensional dan syariah. Pada mulanya tugas pokok BPR adalah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi didaerah pedesaan untuk mengurangi praktek para pelepas uang atau terjerat dengan para rentenir yang menerapkan sistem bunga yang teramat tinggi tetapi semakin berkembangnya zaman BPR semakin tersebar kedaerah perkotaan yang masyarakatnya tergolong memiliki ekonomi yang lemah (Hasibuan, 2001).

Bank Perkreditan Rakyat ditunjukkan untuk melayani masyarakat yang membuka usaha permodalan kecil sehingga lembaga keuangan ini dapat membantu para pengusaha permodalan kecil menengah yang sulit mengakses modal dari Bank Umum dan juga bisa meringankan beban masyarakat yang perekonomiannya lemah untuk bisa membantu dalam memobilisasi dalam pembangunan daerah (Kusafarida, 2003).

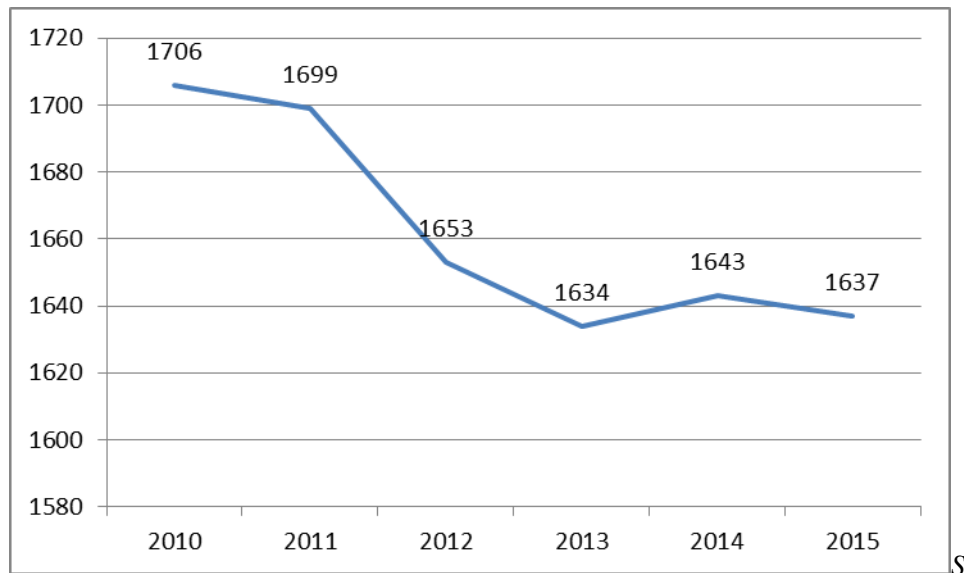
Pada tanggal 27 Oktober 1998 status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) disahkan melalui kebijaksanaan perbankan dan keuangan moneter melalui PAKTO (Paket Oktober), yang dulunya adalah penjelmaan dari lumbung desa dan bank desa yang kemudian sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Perbankan maka BPR disah oleh menteri keuangan menjadi lembaga keuangan bank yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat yang terikat dengan para rentenir. Dulunya BPR hanya memberi pinjaman kepada masyarakat tani dipedesaan berupa pinjaman dalam bentuk natura (padi) dikarenakan zaman dahulu peredaran uang belum menjangkau masyarakat tani dipedesaan serta pinjaman berbentuk natura (padi) bagi masyarakat zaman dulu lebih praktis dari pinjaman dalam bentuk uang. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman BPR yang dulunya hanya sebagai lumbung untuk peminjaman natura (padi) menjadi berubah sebagai pinjaman dalam bentuk uang dikarenakan struktur ekonomi, sosial dan administrasi dalam masyarakat menjadi berubah akibat dari proses pembangunan (Sumitro, 1996).

Banyak masyarakat muslim yang masih belum optimal memanfaatkan Bank Perkreditan Rakyat dikarenakan masyarakat masih menganggap bahwa bunga yang ada pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut adalah riba yang diharamkan adanya oleh islam. Oleh karena itu masyarakat masih mendambakan adanya BPR yang tanpa mengambil keutungan dengan sistem bunga, ternyata dambaan masyarakat tersebut mendapat tanggapan yang baik dari pemerintah, setelah PAKTO (Paket Oktober) memberikan peluang dalam

beroperasinya bank-bank baru tanpa bunga maka peluang BPR beroperasi tanpa menerapkan sistem bunga semakin terbuka. Tanggal 15 Juli 1990 kepastian untuk beroperasinya BPR tanpa bunga tersebut dijelaskan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI secara lisan, dalam penjelasan tersebut pemerintah setuju untuk mengoperasikan BPR tanpa bunga asalkan sesuai dengan kriteria kesehatan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Setelah penjelasan lisan pemerintah tersebut para ulama cendekiawan mulai menyusun program terhadap pendirian BPR Syariah dengan berbagai upaya akhirnya program terhadap pendirian BPR Syariah terealisasi dengan menetapkan tiga lokasi yaitu di Kecamatan Margahayu, di Kecamatan Padalarang dan di Kecamatan Kanjuran Kabupaten Bandung (Sumitro, 1996).

Akhirnya pada tanggal 8 Oktober 1990 ketiga BPR Syariah telah mendapat izin prinsip Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan diperolehnya izin prinsip itu dilakukanlah prinsip-prinsip yang lebih intensif dalam pengelolaan BPR berprinsip syariah di Indonesia, setelah dilakukan prinsip-prinsip syariah dan mendapat dukungan dari umat Islam dan pemerintah munculah BPR-BPR Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia (Sumitro, 1996).

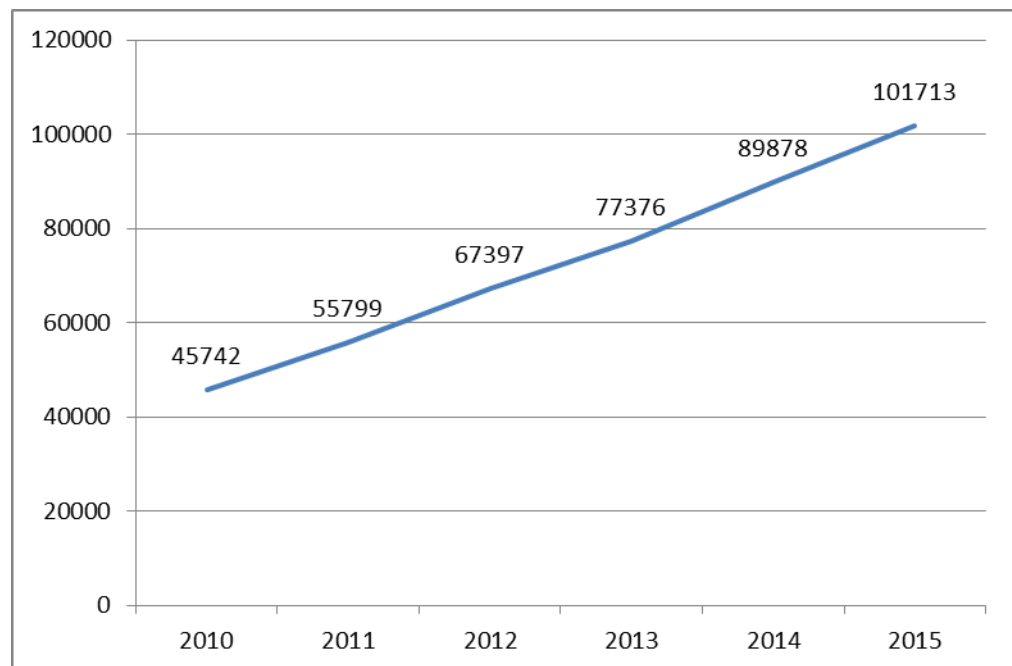
Sejak tahun 2010-2015 terlihat perkembangan BPR dan BPRS di Indonesia dilihat dari jumlah bank dan jumlah asset sebagai berikut :



umber : Bank Indonesia

**Grafik 1.1.**  
Data Jumlah BPR Di Indonesia Tahun 2010-2015 (Unit)

Berdasarkan Grafik 1.1. jumlah perkembangan BPR di Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 1.706 unit bank BPR di seluruh Indonesia sedangkan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 jumlah bank BPR mengalami penurunan menjadi 1.699 unit, 1.653 unit, dan 1.634 unit bank BPR yang masih beroperasi dan pada tahun 2014 bpr meningkat kembali walaupun tidak sebesar tahun 2010, 2011, dan 2012 menjadi 1.643 unit bank BPR sampai tahun 2015 jumlah bank BPR mengalami penurunan kembali menjadi 1.637 unit bank.

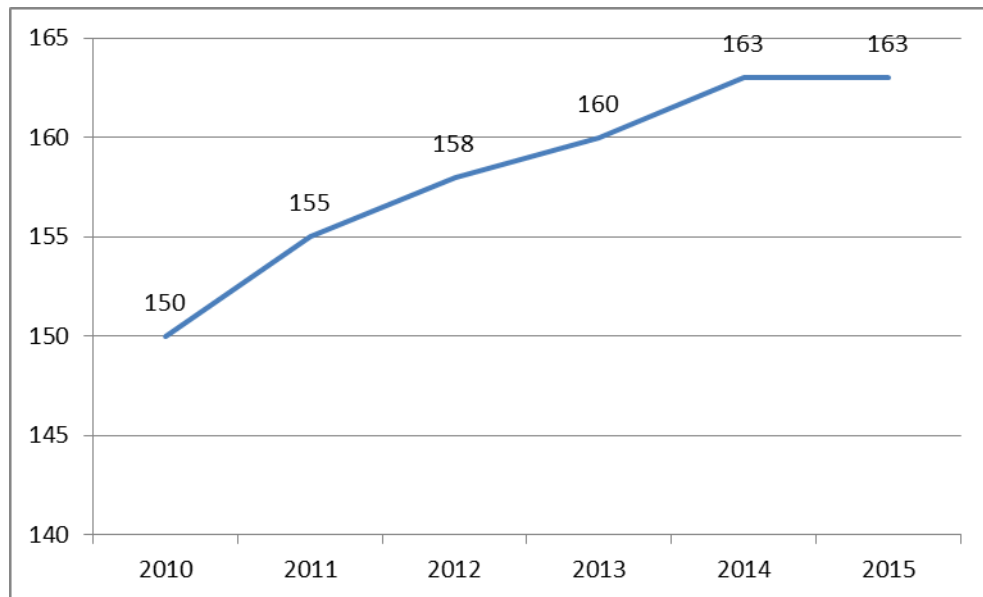


Sumber :Bank Indonesia

### **Grafik 1.2.**

Data Jumlah Asset BPR di Indonesia Tahun 2010-2015 (Milyar)

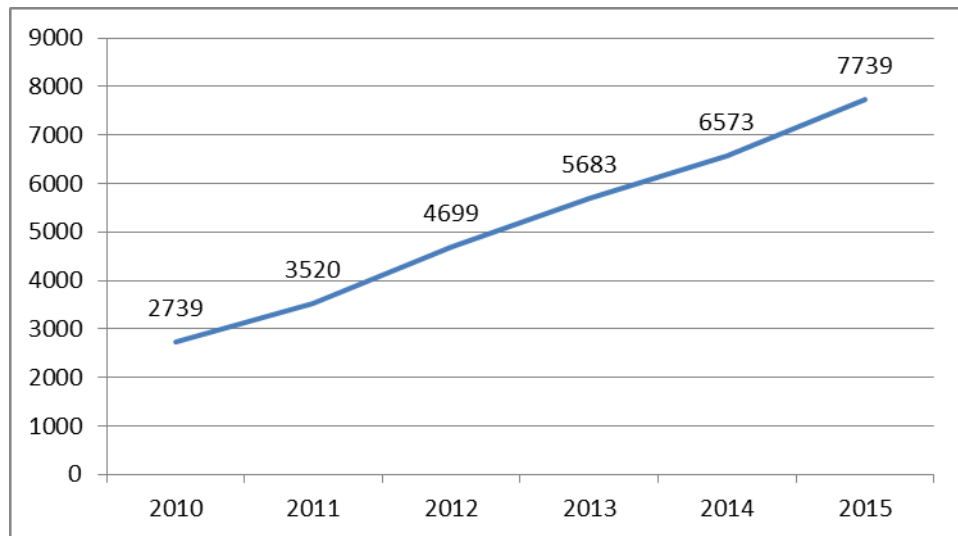
Sedangkan pada Grafik 1.2. jumlah perkembangan asset BPR di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang awal mulanya dari tahun 2010 sebesar 45.742 M meningkat pada tahun 2011 sebesar 55.799 M tahun 2012 sebesar 67.397 M tahun 2013 sebesar 77.376 M tahun 2014 sebesar 89.848 M sampai tahun 2015 jumlah asset BPR meningkat secara drastis sebesar 101.713 M.



Sumber : Bank Indonesia

**Grafik 1.3.**  
Data Jumlah BPRS di Indonesia Tahun 2010-2015 (Unit)

Dilihat dari Grafik 1.3. jumlah perkembangan BPRS di Indonesia dari tahun 2010 yang awalnya hanya berjumlah 150 unit bank mengalami peningkatan pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 menjadi 155 unit , 158 unit, 160 unit, dan 163 unit jumlah bank, sampai tahun 2015 bank BPRS tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jumlah bank tetap 163 unit bank sama dengan tahun 2014 jumlahnya tetap konstan.



Sumber : Bank Indonesia

#### **Grafik 1.4.**

Data Jumlah Asset BPRS di Indonesia Tahun 2010-2015 (Milyar)

Sedangkan dalam grafik 1.4. jumlah tentang perkembangan asset BPRS di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sama halnya dengan BPR walaupun jumlah asset di BPRS tidak sebesar jumlah asset di BPR. Jumlah asset BPRS pada tahun 2010 sebesar 2.739 M pada tahun 2011 sampai tahun 2015 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 3.520 M pada tahun 2011, 4.699 M pada tahun 2012, 5.683 M pada tahun 2013, 6.573 M pada tahun 2014, dan 7.739 M pada tahun 2015.

Dari grafik-grafik diatas terlihat jelas perbedaan antara jumlah BPR dan jumlah BPRS dilihat dari jumlah bank BPR yang setiap tahunnya mengalami penurunan sedangkan jumlah BPRS yang mengalami kenaikan, tapi dari sisi asset baik BPR maupun BPRS dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan demikian perkembangan asset dan jumlah asset mungkin tanda bahwa kinerja BPR atau BPRS mengalami peningkatan yang signifikan.



Dalam beberapa penelitian, perkembangan kinerja keuangan BPR dan BPRS selalu dikaitkan dengan kinerja keuangan yaitu rasio permodalan, rasio rentabilitas, rasio kualitas aktiva produktif, rasio likuiditas serta biaya/efisiensi. Karena dalam suatu perusahaan kinerja itu sangat penting, Dalam bank semakin tinggi kinerja yang dicapai maka semakin tinggi tingkat kesehatan dalam bank serta minat masyarakat untuk mempergunakan jasa bank juga semakin tinggi karena kinerja adalah bisnis kepercayaan dalam perbankan. (Iswandari & Anan, 2015).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti, Kusafarinda (2003) tentang perbandingan analisis kinerja keuangan dan penyaluran kredit BPR dan BPRS periode 1997-1998 (PT. BPR Bali Dayaupaya Mandiri, Kec. Ciawi dan PT. BPRS Amanah Ummah, Kec. Leuwiliang), dengan variabel yang meliputi rasio likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan penyaluran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari rasio likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan penyaluran kredit antara BPR Bali Dayaupaya Mandiri, Kec. Ciawi dan PT. BPRS Amanah Ummah, Kec. Leuwiliang. Sedangkan dalam penelitian yang telah dilakukan Iswandari & Anan (2015) tentang kinerja keuangan BPR dan BPRS di DIY periode 2012-2014, dengan variabel yang meliputi rasio rentabilitas, rasio kualitas produktif, rasio permodalan dan rasio likuiditas dengan hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jika dilihat dari rasio LDR/FDR antara BPR dan BPRS sedangkan jika dilihat dari rasio ROA, ROE, dan NPL/NPF terdapat perbedaan antara

BPR dan BPRS. Sayangnya, penelitian yang sebelumnya hanya membahas tentang faktor-faktor masing-masing kinerja keuangan BPR dan BPRS serta analisis perbandingan kinerja keuangan BPR dan BPRS dalam skala yang kecil, oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian analisis perbandingan kinerja keuangan BPR dan BPRS dalam skala nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bermaksud menganalisis perbandingan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan menggunakan aspek-aspek rasio keuangan dalam perbankan dengan mengangkat judul skripsi: “ Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah di Indonesia Periode 2014-2015 ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka kajian permasalahan yang ingin diteliti adalah :

1. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR dan BPRS dilihat dari rasio permodalan yang diwakili oleh CAR dan manakah yang lebih baik menurut standar Bank Indonesia ?
2. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR dan BPRS dilihat dari rasio rentabilitas yang diwakili oleh ROA dan manakah yang lebih baik menurut standar Bank Indonesia ?
3. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR dan BPRS dilihat dari rasio kualitas aktiva produktif yang diwakili oleh NPL/NPF dan manakah yang lebih baik menurut standar Bank Indonesia?

4. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR dan BPRS dilihat dari rasio likuiditas yang diwakili oleh LDR/FDR dan manakah yang lebih baik menurut standar Bank Indonesia ?
5. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR dan BPRS dilihat dari rasio biaya/efisiensi yang diwakili oleh BOPO dan manakah yang lebih baik menurut standar Bank Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR dan BPRS dilihat dari rasio permodalan yang diwakili oleh CAR serta untuk mengetahui manakah yang lebih baik menurut standar Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR serta BPRS dilihat dari rasio rentabilitas yang diwakili oleh ROA serta untuk mengetahui manakah yang lebih baik menurut standar Bank Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR dan BPRS dilihat dari rasio kualitas aktiva produktif yang diwakili oleh NPL/NPF serta untuk mengetahui manakah yang lebih baik menurut standar Bank Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR dan BPRS dilihat dari rasio likuiditas yang diwakili oleh

LDR serta untuk mengetahui manakah yang lebih baik menurut standar Bank Indonesia.

5. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR dan BPRS dilihat dari rasio biaya/efisiensi yang diwakili oleh BOPO serta untuk mengetahui manakah yang lebih baik menurut standar Bank Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan untuk kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
  - a. Menambah pengetahuan tentang analisis rasio-rasio keuangan yang ada dalam suatu lembaga keuangan sehingga bisa mengetahui keadaan lembaga keuangan tersebut bisa dikatakan sehat atau tidak.
  - b. Belajar untuk meneliti atau mengobservasi suatu permasalahan atau fenomena yang ada dalam suatu lembaga keuangan.
2. Bagi BPR dan BPRS
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BPR dan BPRS dalam segi kinerja keuangan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
3. Bagi mahasiswa

- a. Sebagai bahan referensi bagi para akademis untuk mendapatkan penemuan-penemuan baru terkait dengan kinerja keuangan dalam perbankan.
- b. Untuk tambahan wawasan dan informasi untuk mahasiswa/I yang ingin mengetahui tentang kinerja keuangan dalam suatu perbankan.